



PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG DAN 4 PERADILAN TAHUN 2017

**Dilmiltama / 21 Juni 2017
(Dilmilti II Jakarta, Dilmilll – 08 Jakarta)**

Dirangkum dan disajikan oleh:

Jeanny HV Hutauruk, SE, MM, Ak, CA

**Ketua Tim Sekrt REFORMASI BIROKRASI
MA-RI**

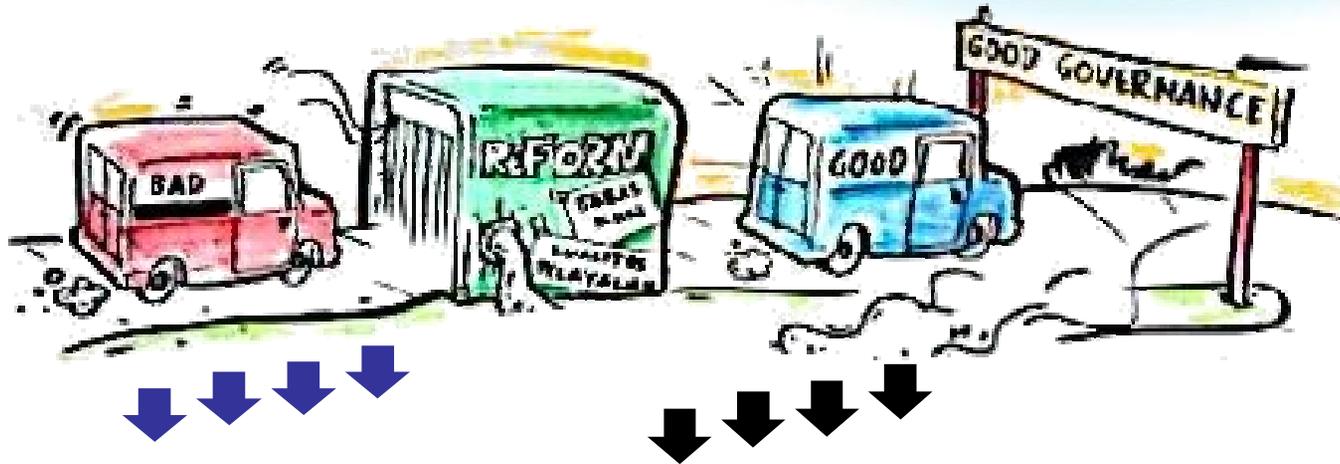
SK SEKMA MA-RI No : 23/SEK/SK/IV/2016, 25 April 2016

SK SEKMA MA-RI No : 4B /SEK/SK/II/2016, 28 Februari 2017

un 2010 ttg Road Map RB 2010- 2014 (#)

2. PP Nomor 81 Tahun 2010 psl 4, ttg *Grand Design RB 2010-2025*
3. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3851);
4. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No 47,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 47, Tambahan Lembaran
Negara RI No 4355
6. UU No 15 Tahun 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 66, Tambahan Lembaran Negara RI No 4400);
7. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 No 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara RI No 5679);
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan
Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
- 10. PermenPAN RB No. 14 Thn 2014 ttg Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah**
- 11. Peraturan MENPAN RB No.11 Thn 2015 ttg Road Map RB Tahun 2015 – 2019**

ASI BIROKRASI



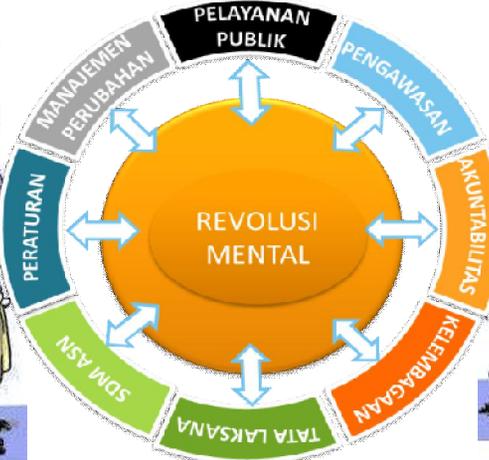
Reformasi Birokrasi adalah upaya Pemerintah untuk mencapai **Good Governance (TARIF)** serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap : **sistem penyelenggaraan pemerintahan** terutama menyangkut antara lain : aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (aparatur).

Reformasi Birokrasi



8 Area Perubahan

- Maraknya KKN
- Rendahnya Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja
- Buruknya Pelayanan Publik



- Bersih dari KKN
- Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Tinggi
- Pelayanan Publik Berkualitas



Langkah Reformasi Birokrasi :

Mendapatkan **komitmen** pimpinan yang kuat

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Membentuk tim reformasi birokrasi

Menetapkan **Road Map** (8 Area Perubahan)

Menerapkan manajemen berbasis **kinerja**

Meng**informasikan** upaya dan hasil secara **berkala**, termasuk **quick wins**

Melaksanakan monitoring dan evaluasi (**PMPRB**)



Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi



Rencana Pembangunan Nasional (2015 – 2019)

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;
- 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok
Pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa,
(2) Pinggiran, (3) Luar
Jawa, (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

Kepastian dan
Penegakan Hukum

Keamanan dan
Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola &
Reformasi Birokrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM

Kerangka Pendanaan:
APBN dan Non-APBN

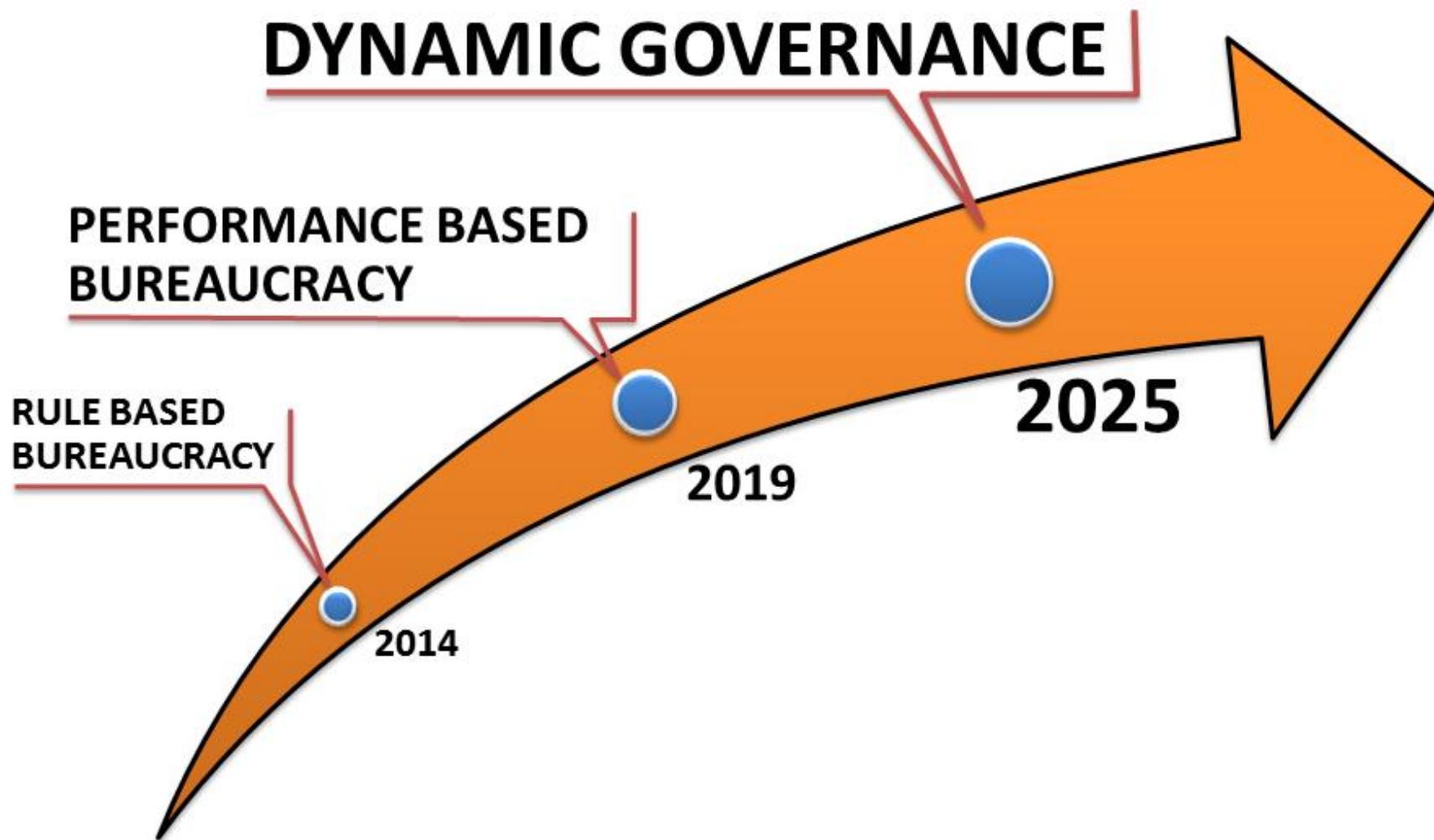
Kerangka Regulasi

Kerangka
Kelembagaan

Sumber:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019

Waktu yang Panjang Pelaksanaan RB:



BERBASIS KINERJA DITANDAI DENGAN ERAPA HAL, ANTARA LAIN:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
- b. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *output* dan *outcomes*.
- c. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
- d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

memiliki arti yang sangat penting,

karena:

- **Perubahan** yang dilakukan secara **terencana** akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai;
- Perubahan yang **terencana** juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi di antara keduanya;
- Perubahan **terencana** yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya ***budaya perubahan ke arah perbaikan.***

RB memiliki arti yang sangat penting, karena:

- Perubahan yang dilakukan dapat **dimonitor dan dievaluasi** secara **berkelanjutan**, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini;
- Perubahan yang dilakukan untuk menjaga agar momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan *target yang hendak dicapai pada tahun 2025* sebagaimana tertuang dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025, yaitu:*

terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia.

ad Map Reformasi Birokrasi :

No	Program	Target
1	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> “ Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi; “ Terjadinya perubahan pola pikir & budaya kerja K/L & Pemda; “ Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> “ Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda; “ Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang - undangan K/L dan Pemda
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> “ Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L dan Pemda; “ Meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
4	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> “ Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda; “ Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda; “ Meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda

Target

		Target
	SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> “ Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing- masing K/L dan Pemda; “ Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda
6	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> “ Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing K/L dan Pemda; “ Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing K/L dan Pemda; “ Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing K/L dan Pemda; “ Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing K/L dan Pemda.
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> “ Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda; “ Meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> “ Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada K/L dan Pemda “ Meningkatnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada K/L dan Pemda “ Meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik untuk masing- masing K/L dan Pemda.

Presiden No 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

- “ Reformasi birokrasi → upaya pemerintah mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- “ Tujuan reformasi birokrasi → menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

- ” Visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah :
- Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia+.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan
SASARAN Reformasi Birokrasi:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel serta berkinerja tinggi
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas



TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
BIROKRASI YANG MENGGUNAKAN SELURUH SUMBER DAYA YANG
DIMILIKI SECARA EFISIEN UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK

2015

1. Tersusunnya penguatan kebijakan penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi
2. Tersusunnya penguatan kebijakan pengawasan
3. Tersusunnya kebijakan pengembangan sistem pengaduan nasional
4. Tersusunnya kebijakan penguatan sistem Akuntabilitas

2016

1. Meningkatnya internalisasi sistem nilai dan integritas birokrasi
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan
3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatnya keterbukaan sistem pelaporan
5. Meningkatnya penerapan sistem *reward and punishment* dalam manajemen kinerja nasional

2017

1. Meningkatnya integritas birokrasi
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan
3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatnya keterbukaan sistem pelaporan
5. Meningkatnya penerapan sistem *reward and punishment* dalam manajemen kinerja nasional
6. Meningkatnya keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
7. Meningkatnya independensi APIP
8. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah
9. Meningkatnya sinergitas sistem pelaporan;

2018

1. Meningkatnya integritas birokrasi
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan
3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatnya intensitas keterbukaan sistem pelaporan
5. Meningkatnya intensitas penerapan sistem *reward and punishment* dalam manajemen kinerja nasional
6. Meningkatnya intensitas keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
7. Meningkatnya intensitas independensi APIP
8. Meningkatnya intensitas pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah
9. Meningkatnya kinerja organisasi instansi pemerintah
10. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan;

2019

1. Meningkatnya integritas birokrasi
2. Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan
3. Meningkatnya sinergitas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatnya intensitas keterbukaan sistem pelaporan
5. Meningkatnya intensitas penerapan sistem *reward and punishment* dalam manajemen kinerja nasional
6. Meningkatnya intensitas keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
7. Meningkatnya intensitas independensi APIP
8. Meningkatnya intensitas pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah
9. Meningkatnya kinerja organisasi instansi pemerintah
10. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan;
11. Meningkatnya transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja;
12. Meningkatnya akuntabilitas publik;
13. Terinternalisasinya Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Integritas pada Instansi Pemerintah
14. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas dari praktek KKN
15. Meningkatnya kontribusi setiap instansi pemerintah pada peningkatan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan

KONDISI SAAT INI

KONDISI YANG DIHARAPKAN

TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS TINGGI, BERSIH DARI PRAKTEK KKN, DAN AKUNTABEL PADA PUBLIK

2015

1. Tersusunnya kebijakan penguatan Reformasi Birokrasi
2. Tersusunnya design kelembagaan K/LPNK/LNS dan pemda
3. Tersusunnya kebijakan implementasi UU Administrasi pemerintahan
4. Tersusunnya kebijakan penyederhanaan bisnis proses
5. Tersusunnya kebijakan penguatan e-government
6. Tersusunnya penguatan sistem pengadaan secara elektronik
7. Tersusunnya berbagai kebijakan pelaksanaan UU ASN
8. Tersusunnya penguatan kebijakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan

2016

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan
3. Meningkatnya efisiensi
4. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi
6. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
7. Meningkatnya kemampuan unit pengelola SDM untuk menerapkan manajemen SDM yang berbasis merit
8. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur
9. Meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan
10. Meningkatnya peran serta publik dalam perumusan kebijakan

2017

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan
3. Meningkatnya efisiensi
4. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatnya sinergi fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah
6. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi
7. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
8. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit
9. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur
10. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai
11. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan
12. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah;

2018

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan
3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi;
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi
5. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan
6. Meningkatnya penggunaan teknologi
7. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
8. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit
9. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai
10. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur
11. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan
12. Meningkatnya kualitas kebijakan publik
13. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah;

2019

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan
3. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi;
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi
5. Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan
6. Meningkatnya efektivitas tata hubungan antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
7. Meningkatnya penggunaan teknologi
8. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
9. Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit
10. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai
11. Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur
12. Meningkatnya integritas aparatur
13. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan
14. Meningkatnya kualitas kebijakan publik
15. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah;

KONDISI SAAT INI

KONDISI YANG DIHARAPKAN

**TERWUJUDNYA BIROKRASI BERKINERJA TINGGI
BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
BIROKRASI YANG MAMPU MEMENUHI PUBLIC NEEDS**

2015

1. Meningkatnya kualitas implementasi UU 25/2009
2. Meningkatnya modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik

2016

1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

2017

1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
9. Meningkatnya investasi dalam negeri.

2018

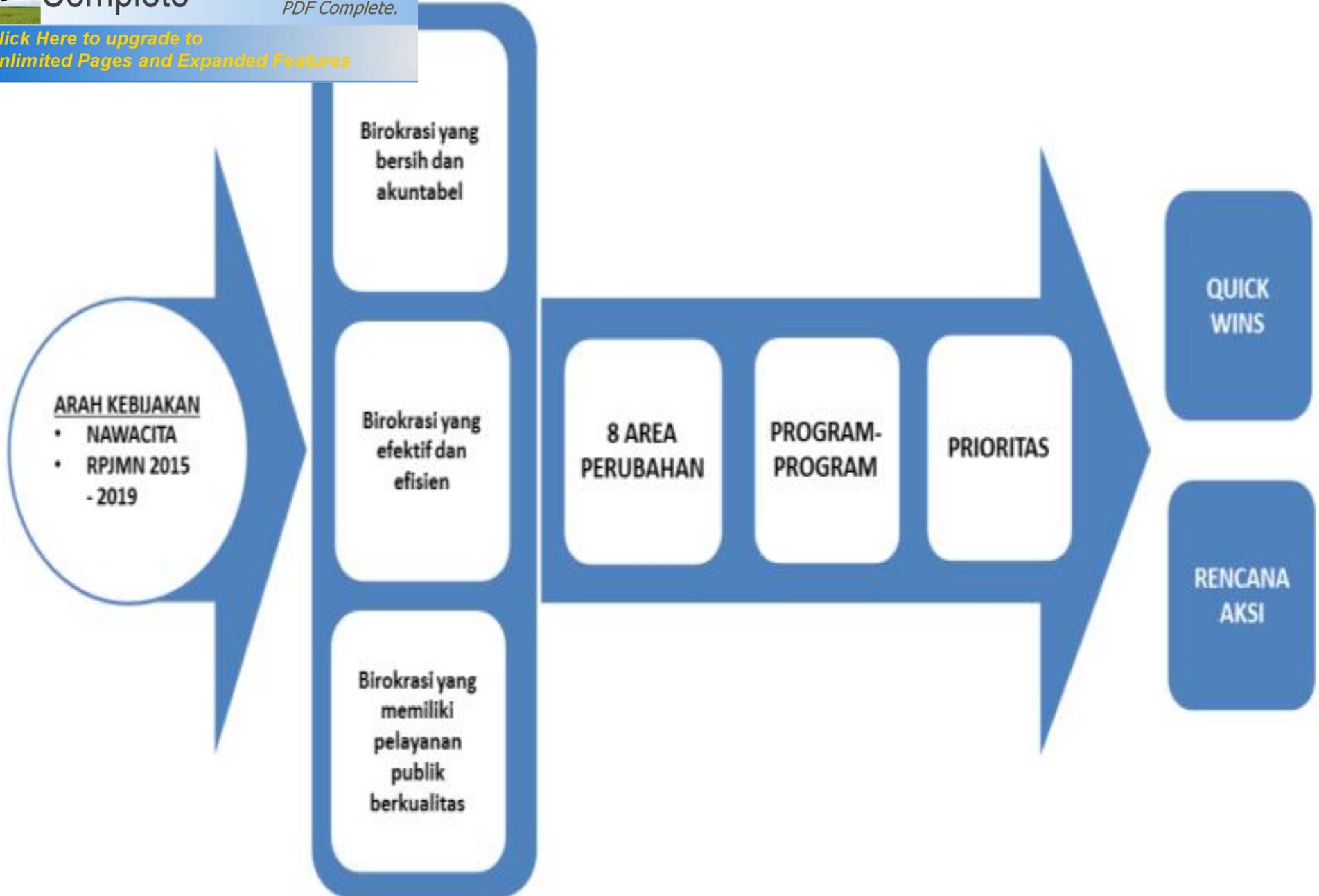
1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya intensitas inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
9. Meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia
10. Meningkatnya investasi dalam dan luar negeri.

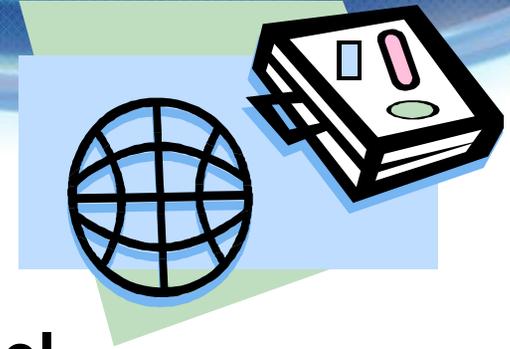
2019

1. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan
2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan;
3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;
4. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan;
5. Meningkatnya intensitas inovasi dalam pelayanan publik;
6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
7. Meningkatnya kesadaran publik terhadap kualitas pelayanan
8. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
10. Meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia
11. Meningkatnya investasi dalam dan luar negeri.
12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang setara dengan negara-negara maju di Asia
13. Menurunnya kesenjangan kualitas pelayanan antar daerah dan antar golongan masyarakat
14. Terwujudnya budaya pelayanan prima
15. Meningkatnya daya saing nasional

KONDISI SAAT INI

KONDISI YANG DIHARAPKAN





1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- a) Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
- b) Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
- c) Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.
- d) Peningkatan *fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang & jasa.*

g efektif dan efisien

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

- a) Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.
- b) Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
- c) Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*.
- d) Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
- e) Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.
- f) Peningkatan kualitas kebijakan publik.
- g) Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.
- h) Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.
- i) Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

...ng memiliki pelayanan publik

berkualitas

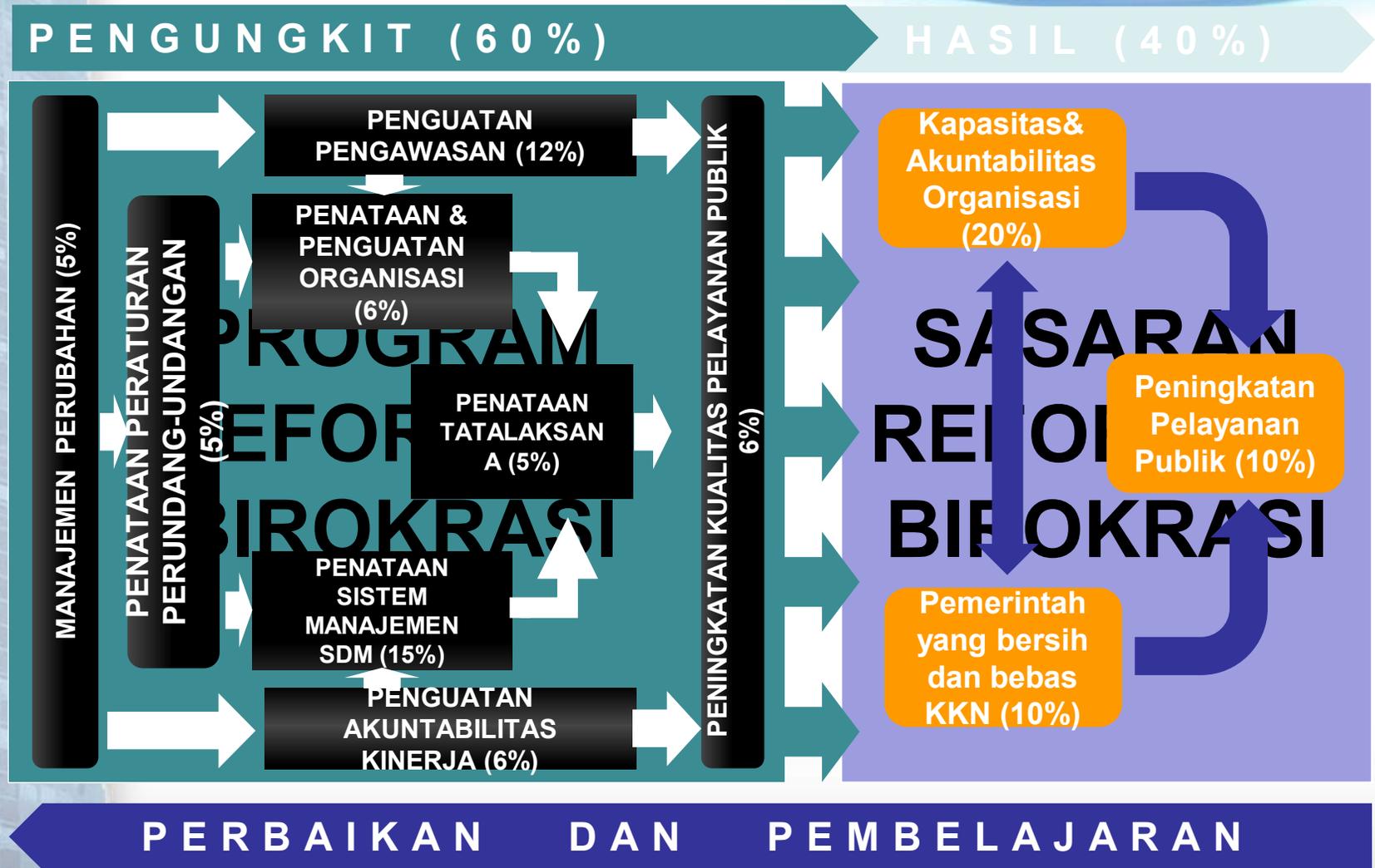
A. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:

- 1) Implementasi UU Pelayanan Publik
- 2) Pemanfaatan ICT (*information communication technology*)
- 3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
- 4) Budaya pelayanan
- 5) *Quick Wins*

B. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

- 1) Penguatan monev kinerja
- 2) Efektivitas pengawasan
- 3) Sistem pengaduan
- 4) Penerapan *reward and punishment*

Angka Logis Evaluasi RB (Internal dan Eksternal)



GUNGKIT (60%)

5

**Manajemen
Perubahan**

15

**Penataan Sistem
Manajemen SDM**

5

**Penataan Peraturan
Perundang-
undangan**

6

**Penguatan
Akuntabilitas**

6

**Penataan dan
Penguatan
Organisasi**

12

**Penguatan
Pengawasan**

5

**Penataan
Tatalaksana**

6

**Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik**

HASIL (40)

Kapasitas dan
Akuntabilitas
Kinerja
Organisasi (20)

- ” Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)
- ” Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)

Pemerintah yang
Bersih dan Bebas
KKN
(10)

- ” Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)
- ” Opini BPK (3)

Kualitas
Pelayanan Publik
(10)

- ” Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)

PROSES BISNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



SANAAN REFORMASI BIROKRASI AH OPTIMAL DI MAHKAMAH AGUNG



Proses Seleksi
Penerimaan CPNS telah
bersih dan transparan



Promosi jabatan
pimpinan tinggi telah
dilakukan secara terbuka



Kinerja organisasi telah
terukur dan akuntabel



Penambahan dan
Penguatan Jabatan
Fungsional



Opini WTP dari BPK
terhadap laporan
keuangan 2012 s/d 2015



Inovasi pelayanan publik
semakin banyak



Penerapan kebijakan
keterbukaan informasi
publik

OKUS KE DEPAN



Mempercepat peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.



Mendorong peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 4 (Empat) Lingkungan Peradilan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.



Mendorong Pengadilan Tingkat Pertama untuk menjadi Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)

KENDALA



1

Kurangnya komitmen dari Pimpinan Organisasi,



3

Kurangnya Pemahaman Tentang RB,



5



2

Keengganan untuk berubah (mengganggu dari comfort zone ke competitive zone).



4



6

TAHAPAN NILAI RB

SUBMIT
1

TIM
SEKRETARIAT

KABAWAS

SUBMIT
2

KABAWAS

SEKMA

SUBMIT
3

SEKMA

MENPAN

ologi Evaluasi PMPRB



1. Evaluasi Dokumen
2. Wawancara
3. Survei (Kuesioner)
4. Observasi Lapangan

UKUM PEMBENTUKAN MA RI

Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

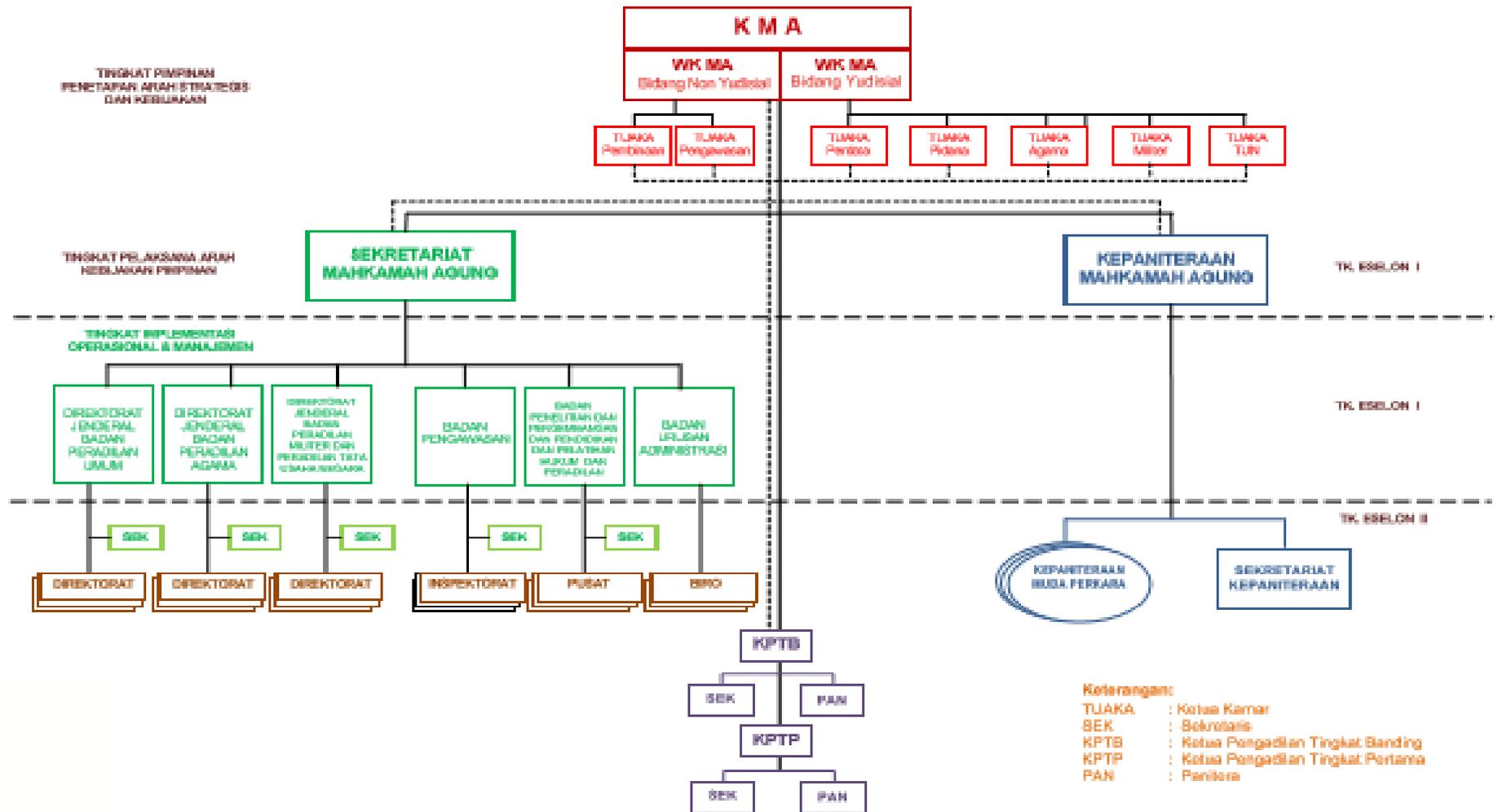
Pasal 24C Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

STRATEGI DAN NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN



ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Keterangan:
TUAKA : Ketua Kamar
SEK : Sekretaris
KPTB : Korps Pengadil Tingkat Banding
KPTP : Korps Pengadil Tingkat Pertama
PAN : Panitera

MAHKAMAH AGUNG RI

Fungsi Peradilan

- " Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi
- " Memeriksa dan Memutuskan Perkara Pada Tingkat Pertama dan Terakhir
- " Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Perundangan Dibawah Undang-Undang

Fungsi Pengawasan

- " Melakukan Pengawasan Tertinggi Terhadap Jalannya Peradilan di Semua Lingkungan Peradilan
- " Mengawasi Tingkah Laku Para Hakim dan Perbuatan Pejabat Pengadilan Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman

Fungsi Mengatur

- " Mengatur Lebih Lanjut Hal-hal Yang Diperlukan Bagi Kelancaran Penyelenggaraan Peradilan
- " Membuat Peraturan Acara Sendiri Bilamana Dianggap Perlu

MAHKAMAH AGUNG RI

Fungsi Nasihat

- “ Memberikan Nasihat atau Pertimbangan Hukum Kepada Lembaga Tinggi Negara
- “ Berwenang Meminta Keterangan Dari Dan Memberi Petunjuk Kepada Pengadilan Di Semua Lingkungan Peradilan

Fungsi Administratif

- “ Mengatur Secara Organisatoris, Administratif dan Finansial Terhadap 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan
- “ Mengatur Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan

Fungsi Lain- Lain

- “ Mahkamah Agung Diserahi Tugas dan Wewenang Lain Berdasarkan Undang-Undang (Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985)

RA MAHKAMAH AGUNG RI

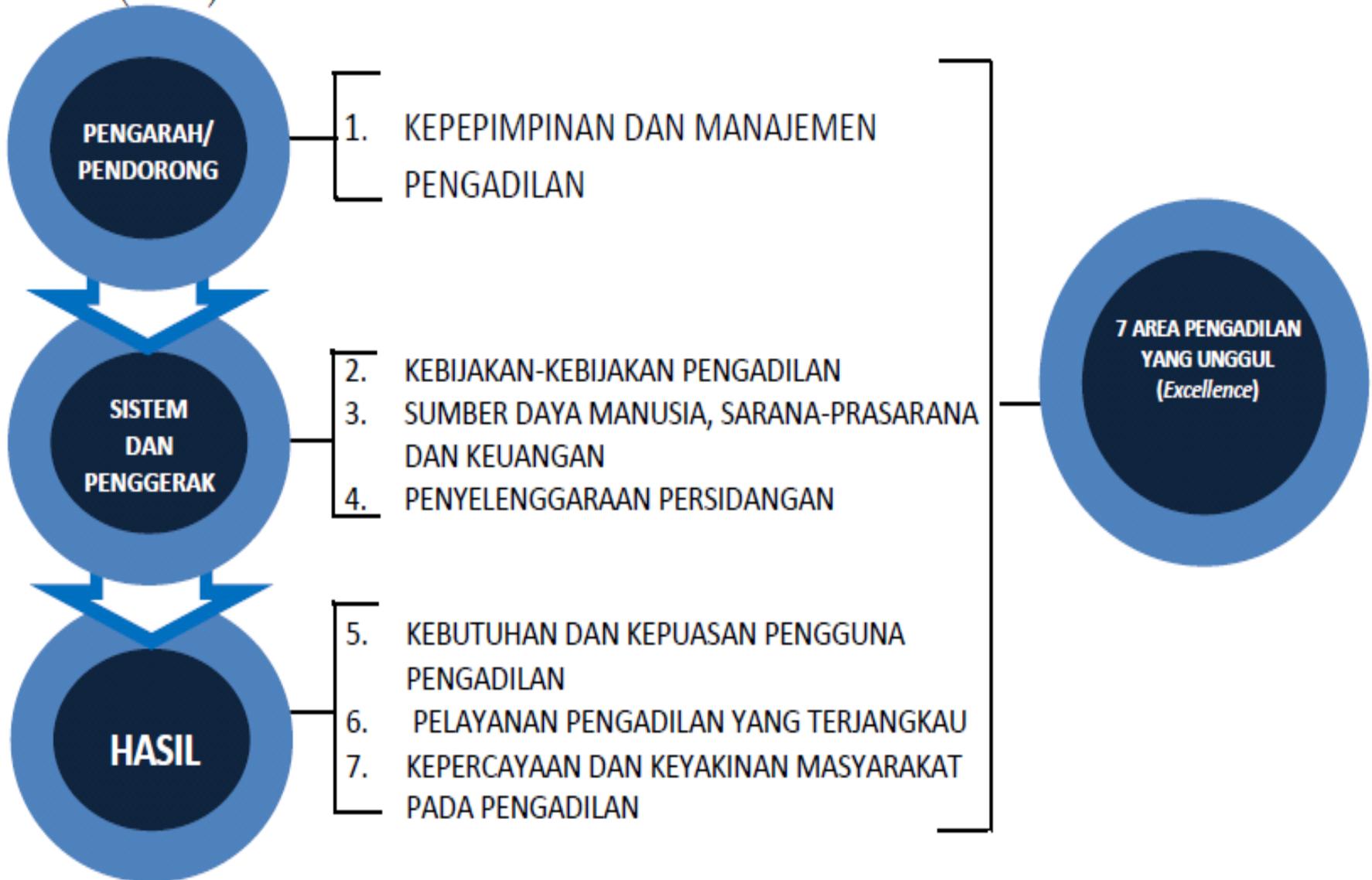
TUJUAN

- “ Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- “ Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- “ Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- “ Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

SASARAN

- “ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- “ Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- “ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- “ Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
- “ Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- “ Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
- “ Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

LUEPRINT MA RI



STRUKTUR ORGANISASI

ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MA RI

Berdasarkan Keputusan Sekretaris MA Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat MA



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



VISI DAN MISI

VISI BADILAG : “Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung”

MISI :

1. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama
4. Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan

VISI : Terwujudnya Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung.

MISI :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Ditjen Badilmiltun serta tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara dan administrasi fasilitatif pada Ditjen Badilmiltun dan Badan Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Meningkatkan standarisasi pranata dan tata laksana perkara pidana Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi fasilitatif Ditjen Badilmiltun, Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

VISI BADILUM : Terwujudnya Kemandirian Peradilan Umum yang Agung.

MISI :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya.
2. Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat.

Tugas Ditjen

TUGAS BADILAG

Membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan Agama pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama

TUGAS BADILUM

Membantu sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan umum pada mahkamah agung dan pengadilan di lingkungan peradilan umum.

TUGAS BADILMILTUN

Membantu Sekretaris Mahkamah Agung Dalam Merumuskan Dan Melaksanakan Kebijakan Dan Standarisasi Teknis Di Bidang Pembinaan Tenaga Teknis, Pembinaan Administrasi Peradilan, Pranata dan Tata Laksana Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan TUN

FUNGSI DITJEN

FUNGSI BADILAG

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.
3. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat

FUNGSI BADILUM

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan umum.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan umum.
3. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan umum.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
5. Pelaksana administrasi direktorat jenderal

FUNGSI BADILMILTUN

1. Penyiapan Perumusan Kebijakan di Bidang Pembinaan Tenaga Teknis, Pembinaan Administrasi Peradilan, Pranata dan Tata Laksana Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan TUN
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembinaan Tenaga Teknis, Pembinaan Administrasi Peradilan, Pranata dan Tata Laksana Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan TUN
3. Perumusan Standar, Norma, Kriteria dan Prosedur di Bidang Pembinaan Tenaga Teknis, Pembinaan Administrasi Peradilan, Pranata dan Tata Laksana Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan TUN
4. Pemberian Bimbingan Teknis dan Evaluasi
5. Pelaksana Administrasi Direktorat Jenderal

SASARAN STRATEGIS DITJEN

BADILAG

- Ø Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara;
- Ø Terwujudnya profesionalitas tenaga teknis Peradilan Agama;
- Ø Tertibnya administrasi perkara kasasi, PK dan Kesyariahan;
- Ø Meningkatnya pelayanan manajemen di lingkungan Ditjen Badilag.

BADILUM

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya.
- Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat.
- Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Umum.
- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

BADILMILTUN

- * Kegiatan Pembinaan Aparatur/Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Profesional.
- * Kegiatan Pembinaan Adiministrasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang modern.
- * Kegiatan Pembinaan penelaahan berkas perkara Pidana Militer dan perkara Tata Usaha Negara.
- * Kegiatan Pemenuhan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi

ALISASI ANGGARAN MA RI TA 2016

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	8.293.911.809.000	7.782.403.888.166	93,83%	511.507.920.834	6,17%
	- ESELON I PUSAT	2.265.644.802.000	2.084.921.745.264	92,02%	180.723.056.736	7,98%
	- DAERAH	6.028.267.007.000	5.697.482.142.902	94,51%	330.784.864.098	5,49%
2	KEPANITERAAN	162.270.100.000	154.390.611.944	95,14%	7.879.488.056	4,86%
3	DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	116.141.000.000	110.878.768.475	95,47%	5.262.231.525	4,53%
	- ESELON I PUSAT	66.354.482.000	64.249.044.431	96,83%	2.105.437.569	3,17%
	- DAERAH	49.786.518.000	46.629.724.044	93,66%	3.156.793.956	6,34%
4	DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	71.956.600.000	70.473.828.204	97,94%	1.482.771.796	2,06%
	- ESELON I PUSAT	37.628.252.000	36.670.785.425	97,46%	957.466.575	2,54%
	- DAERAH	34.328.348.000	33.803.042.779	98,47%	525.305.221	1,53%
5	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	22.831.000.000	21.872.683.465	95,80%	958.316.535	4,20%
	- ESELON I PUSAT	17.904.550.000	17.356.490.281	96,94%	548.059.719	3,06%
	- DAERAH	4.926.450.000	4.516.193.184	91,67%	410.256.816	8,33%
6	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	97.834.800.000	88.456.587.915	90,41%	9.378.212.085	9,59%
7	BADAN PENGAWASAN	31.400.000.000	31.298.872.261	99,68%	101.127.739	0,32%
	JUMLAH	8.796.345.309.000	8.259.775.240.430	93,90%	536.570.068.570	6,10%

* sumber data : <http://spanint.kemenkeu.go.id> per 09 Januari 2017

dan Realisasi Kinerja Penganggaran TA 2016

SATUAN KERJA	TARGET (volume) <small>orang/bulan/laporan/perkara/m2</small>	CAPAIAN OUTPUT (volume) <small>orang/bulan/laporan/perkara/m2</small>	% capaian output	% realisasi anggaran
BADAN PERADILAN UMUM				
ESELON I	3.399	3.534	103,97%	96,83%
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM	2.523	2.325	92,15%	
DIREKTORAT PRANATA DAN TATA LAKSANA PERKARA PERDATA	67	102	152,24%	
DIREKTORAT PRANATA DAN TATA LAKSANA PERKARA PIDANA	67	100	149,25%	
DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM	152	234	153,95%	
SEKRETARIAT DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	590	773	131,02%	
BADAN PERADILAN AGAMA				
ESELON I	2.818	9.052	321,22%	97,46%
DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI	426	1.630	382,63%	
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS	1.772	4.817	271,84%	
DIREKTORAT PRANATA DAN TATA LAKSANA PERDATA AGAMA	42	735	1750,00%	
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	578	1.870	323,53%	
DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN				
ESELON I	727	831	114,31%	96,94%
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN MILITER	146	203	139,04%	
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN TUN	281	331	117,79%	
DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERADILAN MILITER	31	55	177,42%	
DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERADILAN TUN	41	45	109,76%	
SEKRETARIAT DITJEN BADILMILTUN	228	197	86,40%	

AYA MANUSIA - awal Jan 2017

No	JABATAN	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
			Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
1	Hakim Agung	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48
2	Hakim Tinggi Yustisial	54	-	-	-	-	-	-	-	-	54
3	Hakim Yustisial	79	-	-	-	-	-	-	-	-	79
4	Hakim	-	653	3.199	475	2.993	18	120	41	309	7.808
5	Panitera	-	675	4.835	335	2.898	16	32	78	311	9.180
6	Jurusita & Jurusita Pengganti	-	-	2.356	-	1.521	-	-	4	109	3.990
7	Tenaga Non Teknis	1.332	957	3.978	669	2.502	102	302	80	325	10.247
	Jumlah	1.513	2.285	14.368	1.479	9.914	136	454	203	1.054	31.406

PERIKSAAN PERKARA MATH 2016

No.	JENIS PERKARA	SISA 2015	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA AKHIR	% PUTUS v BEBAN	% SISA v BEBAN	% PUTUS v MASUK
1	Perdata	1.680	4.605	6.285	5.279	1.006	83,99%	16,01%	114,64%
2	Perdata Khusus	241	1.271	1.512	1.388	124	91,80%	8,20%	109,21%
3	Pidana	494	1.629	2.123	1.812	311	85,35%	14,65%	111,23%
4	Pidana Khusus	1.033	3.106	4.139	3.422	717	82,68%	17,32%	110,17%
5	Perdata Agama	1	945	946	946	0	100,00%	0,00%	100,11%
6	Pidana Militer	88	393	481	350	131	72,77%	27,23%	89,06%
7	Tata Usaha Negara	413	2.681	3.094	3.026	68	97,80%	2,20%	112,87%
	Jumlah	3.950	14.630	18.580	16.223	2.357	87,31%	12,69%	110,89%

an Perkara Periode 2004-2016

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Jumlah Beban Perkara	Putus	Sisa Akhir	% sisa vs beban
1	2004	20.825	5.730	26.555	6.241	20.314	76,50%
2	2005	20.314	7.468	27.782	11.807	15.975	57,50%
3	2006	15.975	7.825	23.800	11.775	12.025	50,53%
4	2007	12.025	9.516	21.541	10.714	10.827	50,26%
5	2008	10.827	11.338	22.165	13.885	8.280	37,36%
6	2009	8.280	12.540	20.820	11.985	8.835	42,44%
7	2010	8.835	13.480	22.315	13.891	8.424	37,75%
8	2011	8.424	12.990	21.414	13.719	7.695	35,93%
9	2012	7.695	13.412	21.107	10.995	10.112	47,91%
10	2013	10.112	12.337	22.449	16.034	6.415	28,58%
11	2014	6.415	12.511	18.926	14.501	4.425	23,38%
12	2015	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950	21,47%
13	2016	3.950	14.630	18.580	16.223	2.357	12,69%

INDIKS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014-2017

Indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2016 adalah 74,42 dengan kategori "BB" terinci sebagai berikut:

No	Komponen Pengungkit	Bobot	Nilai			
			2014 (evaluated)	2015 (evaluated)	2016 (evaluated)	2017 (self- assessment)
I	Komponen Pengungkit					
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,31	3,85	3,74	5
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	2,09	3,75	3,13	5
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,64	3,68	3,84	6
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,17	3,63	3,47	5
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,34	13,08	13,35	14,89
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,45	4,48	3,95	6
7	Penguatan Pengawasan	12,00	3,99	8,73	8,02	11,75
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6,00	3,54	4,86	4,73	5,84
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	26,73	46,06	44,22	59,48

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai			
			2014 (evaluated)	2015 (evaluated)	2016 (evaluated)	2017(self- assessment)
II	Komponen Hasil					
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	14,09	13,72	14,29	=
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	3	7,66	8,23	=
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,5	6,0	7,68	=
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	21,59	27,38	30,20	=
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	48,33	73,44	74,42	88,27

INTEGRITAS :

Survei internal terhadap integritas organisasi utk tahun 2016 menunjukkan indeks 3,55 dalam skala 0-4 dengan rincian :

No	Komponen	Indeks
1	Budaya Organisasi dan sistem Anti Korupsi	3.57
2	Integritas terkait pengelolaan SDM	3.43
3	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,55
4	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,65

MAN LAKIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memperoleh nilai **61,77** atau predikat “**B**”. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2015	2016
a.	Perencanaan Kinerja	30	19.78	18,71
b.	Pengukuran Kinerja	25	15.3	14,84
c.	Pelaporan Kinerja	15	10.28	10,71
d.	Evaluasi Internal	10	5.57	5,32
e.	Capaian Kinerja	20	13.1	12,19
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64.03	61,77
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

GAN REFORMASI BIROKRASI MA (KEUNGGULAN)

**Menyelesaikan Program Quick Wins, berupa :
Transparansi Putusan, Pengembangan Teknologi
Informasi, Pengelolaan PNBP, Kode Etik Hakim, Analisa
dan Evaluasi Pekerjaan.**

**Menerima Tunjangan Kinerja Sebesar 70% Sejak
Tahun 2008 Berdasarkan PerPres Nomor 19 Tahun
2008.**

**Terbitnya Surat Keputusan Nomor :
071/KMA/SK/V/2008 Tertanggal 14 Mei 2008 Tentang
Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus**

**MA Berhasil Meng-upload Lebih Dari 10.000 Putusan
Melalui Situs Direktori Putusan**

Mengembangkan Website di Lebih dari 250 Pengadilan

GAN REFORMASI BIROKRASI MA (KEUNGGULAN)

Mengelola PNBP, Biaya Perkara yang Diumumkan dan Pembayaran Langsung ke Bank.

Melakukan Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik Hakim pada lebih dari 2.000 Orang

Merumuskan Uraian Pekerjaan Untuk Sebanyak 875 Posisi

Merumuskan 26 grading (Hays System)

REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none">1. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi.2. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi3. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti4. Road Map telah disusun dan diformalkan.5. Road Map telah mencakup 8 area perubahan (minimal 4 Area)6. Road Map telah mencakup "quick win"7. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi.

REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none">14. Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?15. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan.16. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.17. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan.18. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model.

EFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none">8. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi.9. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik.10. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja.11. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB.12. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.13. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?

INFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="877 505 1919 716">1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron.<li data-bbox="877 732 1919 886">2. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron.<li data-bbox="877 902 1919 1179">3. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi<li data-bbox="877 1195 1919 1349">4. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

EFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi.2. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi.3. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi.4. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok.5. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan.6. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan.7. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat.

INFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
<p>Penataan dan Penguatan Organisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain. 9. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. 10. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi.
<p>Penataan Tata Laksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi. 2. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP). 3. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan. 4. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi. 5. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi

REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none">1. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi.2. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP).3. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.4. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi.5. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi.6. Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll).7. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan).

FORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none">8. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll).9. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian).10. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik.11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan.2. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan.3. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan.4. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan.5. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan.

INFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none">6. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat.7. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online).8. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif.9. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN.10. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka.11. Telah ada standar kompetensi jabatan.12. Telah dilakukan asesment pegawai.13. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi.14. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi.15. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi.

REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none">16. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.17. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan.18. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan.19. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif.20. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen.21. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka.22. Penerapan Penetapan kinerja individu.23. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi .24. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya.25. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik.

INFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none">26. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.27. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu.28. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja.29. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan.30. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan.31. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi.32. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward).33. Informasi faktor jabatan telah disusun.34. Peta jabatan telah ditetapkan.35. Kelas jabatan telah ditetapkan.36. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan.37. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai.38. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan.39. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.

REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra2. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.3. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.4. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.5. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun.6. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik.7. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit.8. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala.

INFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi.2. Telah dilakukan public campaign.3. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan.4. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.5. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti.6. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP.7. Telah dibangun lingkungan pengendalian.8. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi.

INFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">9. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.10. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.11. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern.12. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat.13. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan.14. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.15. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.16. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.17. Telah terdapat Whistle Blowing System.18. Whistle Blowing System telah disosialisasikan.19. Whistle Blowing System telah diimplementasikan.20. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System.

EFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">21. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti.22. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan.23. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan.24. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.25. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.26. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.27. Telah dilakukan pencanangan zona integritas.28. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas.29. Telah dilakukan pembangunan zona integritas.30. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan.31. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai % menuju WBK/WBBM+

REFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">32. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan.33. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.34. APIP didukung dengan anggaran yang memadai.35. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Telah terdapat kebijakan standar pelayanan.2. Standar pelayanan telah dimaklumkan.3. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.4. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan.5. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP.6. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima).7. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.

INFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">8. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar Standar pelayanan telah dimaklumkan.9. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.10. Terdapat inovasi pelayanan.11. Terdapat media pengaduan pelayanan.12. Terdapat SOP pengaduan pelayanan.13. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan.14. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan.15. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan.16. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.17. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.18. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

INFORMASI BIROKRASI MA

PROGRAM	PENJELASAN
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	19. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan. 20. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan. 21. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus.

ilan yg sdh diterima- per tgl 1 Mei 2017:

- " 1. P. Umum : 214 SK
- " 2. P. Agama : 304 SK
- " 3. P. Militer : 22 SK
- " 4. P. TUN : 22 SK
- Jumlah : 562 SK

" Email :

jeannyhutaurok@ditjenmiltun.net

TERIMA KASIH ===

TIKDM SUKSES TANPA PERJUANGAN



BERSATU KITA TEGUH-BERCERAI KITA RUNTUH